

## Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di SMP Nihayatul Amal Karawang

Taufik Mustofa

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[3210210020@student.uinsgd.ac.id](mailto:3210210020@student.uinsgd.ac.id)

Kaelani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[3210210011@student.uinsgd.ac.id](mailto:3210210011@student.uinsgd.ac.id)

Mohamad Erihadiana UIN

Sunan Gunung Djati Bandung

[erihadiana@uinsgd.ac.id](mailto:erihadiana@uinsgd.ac.id)

### Abstract

*The current government has encouraged every school to implement a communitybased education system. The active role of the community in the implementation of education is very important for the achievement of educational goals. Educational institutions are currently expected to position the community as partners or be actively involved in the preparation and supervision of all programs made by educational institutions, including Islamic-based formal educational institutions. The purpose of this study is to find out and describe how the implementation of community-based education management in institutional management in Islamic Junior High School Nihayatul Amal Rawamerta Karawang. This study uses a qualitative approach with the type of field research (field research). Data collection techniques using interviews and documentation. Sources of data were obtained from school principals, committees, community leaders and documents relevant to the research. The data analysis used is data reduction, data presentation and data verification. The results of the study indicate that SMP Nihayatul Amal is an educational institution that was born and pioneered by the community. Therefore, SMP Nihayatul Amal implements a community-based education administration system. This can be seen from the active participation of the community in the management of educational institutions at the Nihayatul Amal Middle School. Community participation in the implementation of education at Islamic Junior High School Nihayatul Amal is reflected in the three management components of education, namely the management of facilities and infrastructure, financial management and curriculum management.*

**Keywords:** Education Management, Society, Nihayatul Amal Middle School

### Abstrak

Pemerintah saat ini telah mendorong setiap sekolah untuk menerapkan sistem Pendidikan yang berbasis masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan hal yang sangat penting demi tercapainya tujuan Pendidikan. Lembaga Pendidikan saat ini diharapkan memosisikan masyarakat sebagai mitra atau terlibat aktif dalam penyusunan dan pengawasan seluruh program yang dibuat oleh lembaga pendidikan tidak terkecuali Lembaga Pendidikan formal yang berbasis Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana penerapan manajemen Pendidikan berbasis masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan di SMP Islam Nihayatul Amal Rawamerta Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari kepala sekolah, komite, tokoh masyarakat serta dokumen yang relevan dengan penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Nihayatul Amal merupakan lembaga pendidikan yang lahir dan dipelopori oleh masyarakat. Oleh sebab itu SMP Nihayatul Amal menerapkan system penyelenggaraan pendidikan yang berbasis masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan SMP Nihayatul Amal. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Islam Nihayatul Amal tercermin dari tiga pengelolaan komponen pendidikan yaitu pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan dan pengelolaan kurikulum.

**Kata kunci:** *Manajemen Pendidikan, Masyarakat, SMP Nihayatul Amal*

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia secara umum memiliki tiga era perubahan. Pertama, pendidikan yang sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat diintegrasikan ke dalam lembaga keagamaan, baik pendidikan yang dilaksanakan di surau, masjid, maupun pesantren. Kedua, Pendidikan menjadi program pemerintah dan dikelola secara terpusat dalam hal perencanaan, pendanaan dan berbagai sumber daya lainnya. Lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 memperkuat sentralisasi ini tidak hanya dalam standar kualitas, tetapi juga dalam metode evaluasi kurikulum dan hasil pembelajaran. Ketiga, dilandasi dengan diberlakukannya Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003, secara implisit mengandung makna agar masyarakat memperoleh kembali haknya untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan (Rosyada, 2004), sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Gagasan tersebut diperjelas dengan pasal 6 yang sama, yakni pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003, masyarakat tidak dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena semua kebijakan dan sistem pendidikan terpusat dan kontribusi dari luar sistem negara diabaikan, sehingga penyelenggara pendidikan seolah-olah tidak lebih dari perpanjangan tangan penguasa. Kebijakan ini dikenal dengan istilah *top-down policy*, artinya kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dalam upaya untuk menyelenggarakan pendidikan secara merata. Dalam kerangka kebijakan ini, pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, pada saat ini keputusan pembangunan pendidikan merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan menerapkan prinsip *people-centered development* (Moeljarto Tjokrowinoto, 1995). Masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi di sini ditafsirkan sebagai bentuk kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), melaksanakan (*actuating*), mengontrol (*controlling*), dan mengevaluasi

(*evaluating*). Dengan kata lain pendidikan saat ini berlangsung dari, oleh dan bersama masyarakat. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan harus bisa memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat, berarti posisi masyarakat bukan sebagai obyek pendidikan, tetapi partisipan aktif yang mempunyai peranan dalam setiap langkah program pendidikan. Sedangkan prinsip bersama masyarakat artinya bahwa masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang telah mendapat persetujuan masyarakat, karena lahir dari kebutuhan nyata masyarakat itu sendiri. Konsep seperti inilah yang sekarang dikenal dengan sebutan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) (Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, 2001).

## **METODE**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisis komprehensif dan menyeluruh (Arikunto, 2002). Subjek penelitian adalah pihak yang langsung berhubungan dengan masalah penelitian, seperti pengurus Yayasan, komite sekolah, kepala-kepala sekolah dan guru SMP Nihayatul Amal. Obyek penelitian yaitu kegiatan-kegiatan sekolah terkait dengan masalah penelitian diantaranya manajemen kelembagaan di SMP

Nihayatul Amal dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **TEMUAN & DISKUSI**

Istilah manajemen sebenarnya mengacu kepada proses pelaksanaan aktifitas yang diselesaikan secara efisien dengan dan melalui pendayagunaan

orang lain (Mariono, 2008). Para ahli mengabstraksikan proses manajemen menjadi 4 proses. Yaitu, *planning, organizing, actuating, dan controlling* (PAOC). Empat proses manajemen ini digambarkan dalam bentuk siklus karena adanya saling keterkaitan antara proses yang pertama dan berikutnya, begitu juga setelah pelaksanaan pengawasan lazimnya dilanjutkan dengan membuat perencanaan baru hingga siklus proses manajemen akan selalu berputar (Safaruddin, 2020).

Pendidikan Islam dalam pandangan Imam Al-Ghazali (Suban, 2020) merupakan proses memanusiakan manusia sampai akhir hayatnya menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia sempurna. Sedangkan pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam (Muhaimin, 2009).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen lembaga pendidikan Islam adalah suatu proses penataan dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan seluruh sumber daya manusia (*stakeholder*) dalam rangka menggerakkan lembaga pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah dirumuskan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen pendidikan Islam adalah agar segenap sumber, peralatan ataupun sarana yang ada dalam suatu organisasi tersebut dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan sampai tingkat seminimal mungkin segenap pemborosan waktu, tenaga, materil, dan uang guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Fatoni, 2015).

Hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan peserta didik di sekolah baik dalam segi sikap, pengetahuan ataupun keterampilan siswa. Dalam hal ini, lembaga pendidikan Islam sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat.

Lembaga pendidikan Islam dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Sebaliknya lembaga pendidikan Islam juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam berkewajiban melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program lembaga pendidikan Islam. Disamping itu juga, lembaga pendidikan Islam juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan unutan masyarakat, terutama terhadap lembaga pendidikan Islam. Dengan kata lain, antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat harus dikelola dan dibina suatu hubungan yang harmonis. Hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk: a) Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak.

- b) Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat.
- c) Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan Islam.

Hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya terutama kepada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak.

Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, hubungan kerja sama ini tidak perlu di bina. Pada masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan, lembaga pendidikan Islam dituntut lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis. Jika hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggungjawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan lembaga pendidikan Islam juga akan baik dan tinggi.

### **Profil Singkat SMP Nihayatul Amal Rawamerta Karawang**

SMP Nihayatul Amal Rawamerta didirikan pada tahun 2002, faktor yang melatar belakangi pendirian sekolah ini adalah semakin banyaknya santri dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu di lingkungan Pondok Pesantren Nihayatul Amal pimpinan Alm. KH. Ahmad Busyaeri, karena banyaknya permintaan dari para orang tua/wali yang mempercayakan pendidikan keagamaannya di Pondok Pesantren Nihayatul Amal agar pihak Pesantren Nihayatul Amal mendirikan sekolah formal untuk mendidik anak-anak mereka pada aspek pendidikan formal. Oleh karena itu, pada tahun 2002 Alm KH. Ahmad Busyaeri mengamanatkan kepada keluarga besar Nihayatul Amal agar segera mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal yang bernafaskan ke-Islaman, untuk memenuhi kebutuhan para santri di bidang pendidikan formal. Maka dengan dukungan pihak keluarga dan masyarakat sekitar berdirilah SMP Nihayatul Amal Rawamerta hingga sekarang ini.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikannya, SMP Nihayatul Amal menerapkan pengelolaan atau manajemen pendidikan yang berbasis masyarakat setidaknya dalam tiga komponen pokok pengelolaan lembaga pendidikan, diantaranya pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan dan pengelolaan kurikulum.

#### **1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

Seluruh sarana dan prasarana pendidikan di SMP Nihayatul Amal dikelola secara penuh oleh yayasan, baik yang bersumber dari bantuan pemerintah maupun yang bersumber dari bantuan masyarakat. Adapun alur pengelolaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di SMP Nihayatul Amal berdasarkan dokumen Standar Operasional Prosedur yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah membuat rencana pengadaan sarana dan prasarana di awal tahun pelajaran yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

- b. Sekolah membuat usulan terhadap pengurus yayasan melalui divisi sarpras Yayasan
- c. Pengurus yayasan melaksanakan Rapat Pimpinan untuk menentukan skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana unit Pendidikan
- d. Pengurus Yayasan Bersama kepala sekolah membentuk panitia pelaksana yang didalamnya melibatkan komite sekolah sebagai wakil dari unsur masyarakat untuk melaksanakan pengadaan sarpras mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Sebagaimana halnya lembaga pendidikan lainnya yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat, maka sarana dan prasarana yang ada di SMP Nihayatul Amal sebagian besar juga berasal dari sumbangsih masyarakat, diantaranya:

- a. Penyediaan tanah wakaf untuk sarana belajar mengajar maupun prasarana lainnya
- b. Masyarakat ikut serta memberikan sumbangan materiil, maupun tenaga dalam setiap pembangunan sarana prasarana pendidikan seperti bantuan konsumsi, dana, tenaga pengecoran, manaqiban, bahan-bahan bangunan, dan lain-lain.
- c. Penyediaan lahan parkir siswa, tempat ibadah (masjid) untuk kegiatan keagamaan, sarana lapangan olah raga, dll.

## **2. Pengelolaan Keuangan**

Dilihat dari asalnya, keuangan SMP Nihayatul Amal bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang bersumber dari pemerintah baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dan dari masyarakat dalam bentuk infaq, dana komite, uang pangkal, dan lainnya. Dalam hal pengajuan bantuan keuangan kepada pemerintah, masyarakat, maupun sumber-sumber lainnya harus melalui persetujuan Dewan Pengurus Yayasan dan dewan komite sekolah. Di dalam pengelolaannya, Kepala SMP Nihayatul Amal menugaskan bendahara yang diangkat oleh Yayasan untuk secara rutin akhir bulan atau tiga bulan membuat



laporan pertanggung jawaban kepada bendahara yayasan mengenai sumber keuangan maupun pembelanjannya yang kemudian diteruskan kepada Dewan pengurus yayasan dan Komite SMP Nihayatul Amal sebagai perwakilan masyarakat. Kemudian pihak- pihak tersebut dapat mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan dan memberikan koreksi dan evaluasi sewaktu-waktu. Evaluasi pelaksanaan rencana anggaran satuan pendidikan disahkan oleh Dewan Pengurus Yayasan setiap akhir tahun anggaran dan disertai berita acara pemeriksaan.

### **3. Pengelolaan Kurikulum**

Proses penyusunan kurikulum di SMP Nihayatul Amal ditetapkan dalam rapat Tim pengembang kurikulum yang melibatkan seluruh stakeholder pendidikan baik dari unsur komite madrasah, guru, tokoh masyarakat, pengawas madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran. Kurikulum di SMP Nihayatul Amal merupakan perpaduan antara kurikulum pemerintah dengan kurikulum pesantren. Hal ini dikarenakan secara historis dan idiologis SMP Nihayatul Amal berdiri tidak lepas dari kurikulum pesantren. Hal ini di maksudkan untuk membekali siswa agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dengan bekal akhlakul karimah. Konsep kurikulum hasil rapat tim pengembang kurikulum ini selanjutnya dirumuskan dan dijabarkan dalam kurikulum khas SMP Nihayatul Amal. Penyusunan kurikulum di SMP Nihayatul Amal disamping mengacu pada peraturan kurikulum pemerintah juga didasarkan pada visi dan misi sekolah sebagai turunan dari visi dan misi yayasan Tarbiyatul Wildan serta.

Secara operasional muatan kurikulum pondok pesantren tersebut dikembangkan melalui penerapan kurikulum muatan local dan pembiasaan perilaku keagamaan, yang masing-masing satuan Pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Wildan termasuk SMP Nihayatul Amal diberi wewenang untuk mengembangkan lebih lanjut. Sedangkan kurikulum

modern yang ditetapkan pemerintah diterapkan melalui kurikulum pelajaran umum dari Kementerian Pendidikan Nasional dan kurikulum pelajaran agama dari Kementerian Agama. Dari deskripsi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sumbangan ide dari masyarakat dalam penyusunan kurikulum pendidikan di SMP Nihayatul Amal tersebut disusun dalam bentuk kurikulum tambahan antara lain:

- a. Kurikulum muatan lokal keagamaan, yang memuat materi-materi kitab kuning dan keterampilan agama.
- b. Pengembangan diri, berupa keterampilan tambahan melalui kegiatan ekstrakurikuler
- c. Pembiasaan perilaku, baik dalam proses belajar mengajar maupun di luar jam pelajaran

## KESIMPULAN

Manajemen pendidikan berbasis masyarakat bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber, personil, dan materiil dalam dunia pendidikan yang berbasiskan atau melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam ilmu manajemen, istilah partisipasi diartikan sebagai proses pelibatan mental dan emosional dalam suatu aktivitas. Tingkat keberhasilan pendidikan berbasis masyarakat menjadi sangat tergantung pada sejauhmana tingkat keterlibatan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Impikasinya adalah tujuan pendidikan, poses pendidikan, sarana pendidikan serta mutu pendidikan termasuk tanggung jawab masyarakat setempat.

SMP Nihayatul Amal merupakan lembaga pendidikan yang didirikan dan diprakarsai oleh masyarakat setempat dengan melibatkan para ulama, kyai, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, maupun tokoh pendidikan dan stakeholder sekolah lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan di SMP Nihayatul Amal tercermin setidaknya dalam pengelolaan tiga komponen pendidikan meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan dan pengelolaan kurikulum. Oleh karena itu dalam pengelolaan lembaga pendidikannya, cenderung menggunakan sistem Manajemen Berbasis Masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat baik secara emosional, material, finansial, maupun spiritual, sejak dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian sekolah.

## REFERENSI

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Fatoni, A. (2015). Konsep Manajemen Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an Dan Hadis. *Didaktika Religia*, 3(2).
- Mariono, D. (2008). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljarto Tjokrowinoto. (1995). *Politik Pembangunan; Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muhaimin, dkk. (2009). *Manajemen Pendidikan: Aplikasi Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana.
- Rosyada, D. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Safaruddin, S. (2020). Konsep Manajemen Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 6(2).  
<https://doi.org/10.47435/al-qalam.v6i2.172>
- Suban, A. (2020). Konsep Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1).  
<https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.13760>
- Undang-undang No. 20 (2003). *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Penjelasannya*, Media Wacana, Yogyakarta